

BAB I

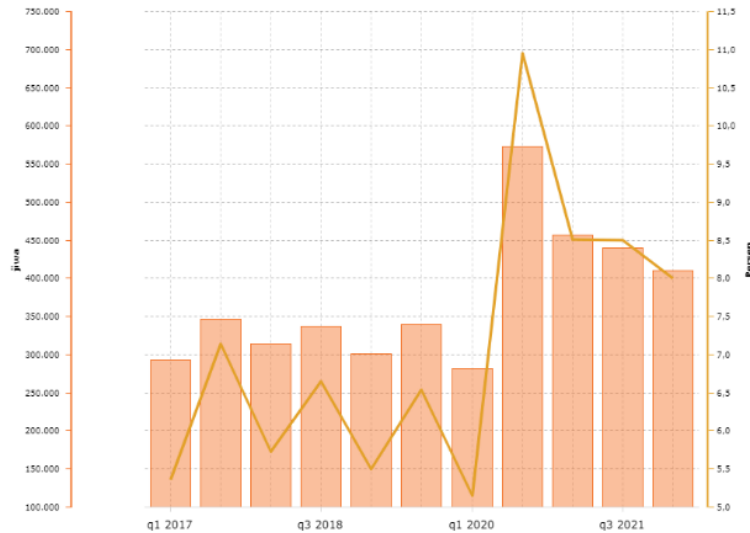
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan program-program dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan, yang mana kesejahteraan masih menjadi masalah penting yang masih terjadi hingga saat ini (Nurfitriyani, 2014: 564). Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial ini masih banyak terjadi di kota-kota yang memiliki jumlah penduduk banyak, salah satunya Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa total penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai jumlah 10,56 juta jiwa. Sebagian besar dari masyarakat yang melakukan urbanisasi ke DKI Jakarta menganggap bahwa kota ini menjanjikan dari segi ekonomi (Anggraeni, 2022: 42). Pada akhirnya, kepadatan jumlah penduduk ini berakibat pada kurangnya pengendalian serta sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan, sebab tingginya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Pengangguran DKI Jakarta Periode 2017-Februari 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (databoks.katadata.co.id)

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta tepatnya pada kuartal ketiga tahun 2020, yakni hingga mencapai 572.780 orang atau 10,95% dari total angkatan kerja.

Jakarta Barat merupakan salah satu kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2.440.073 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan pada tahun 2021. Salah satu kecamatan paling padat penduduk bahkan berada di kota ini. Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tambora dengan kepadatan penduduk mencapai 44.794 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jakarta Barat yakni sebesar 9,06%.

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021

Kab/Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kepulauan Seribu	629.315	661.852	670.785	2.93	3.63	3.86	12.09	14.87	15.06
Jakarta Selatan	729.256	782.731	792.684	61.77	78.09	81.50	2.73	3.43	3.56
Jakarta Timur	539.510	581.954	594.849	91.51	122.73	125.37	3.12	4.16	4.28
Jakarta Pusat	625.177	672.328	689.379	34.13	41.92	45.10	3.68	4.51	4.94
Jakarta Barat	517.646	557.803	570.330	84.06	110.90	113.37	3.25	4.25	4.31
Jakarta Utara	549.506	594.240	609.310	91.15	123.59	132.73	5.04	6.78	7.24
DKI Jakarta	637.260	680.401	697.638	365.55	480.86	501.92	3.47	4.53	4.72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 (jakarta.bps.go.id)

Tabel di atas memperlihatkan garis kemiskinan, jumlah, serta persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2021. Secara garis besar, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa sebagian besar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak di setiap kota administrasi. Jakarta Barat merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dilihat dari garis kemiskinannya, Jakarta Barat memiliki tingkat pendapatan terendah dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya pada tahun 2019-2021.

Pemerintah terus mendukung upaya-upaya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam berwirausaha untuk menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan fokus urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yakni

kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja menjadi terciptanya lapangan pekerjaan atau berwirausaha.

Usaha dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat untuk berwirausaha juga tercatat dalam salah satu dari lima misi pembangunan daerah di RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 pada misi kedua yakni “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, kewirausahaan yang kreatif dan produktif, serta mendorong terciptanya kesejahteraan serta keadilan sosial-ekonomi masyarakatnya. Amanah pembangunan nasional dalam misi ini salah satunya tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan penyediaan lapangan kerja, akan tetapi juga pemerintah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dengan memunculkan wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yakni dari sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM dinyatakan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau

dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. (Mariam & Yuliani 2022: 182).

BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil SE2016 Listing yakni bahwa jumlah UMKM mencapai lebih dari 1 juta usaha atau 98,78% dari total usaha UMB di DKI Jakarta (Sunaryo et al. 2018: 235). Bahkan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja di DKI Jakarta hingga mencapai lebih dari 2,5 juta orang atau sekitar 35,07% dari total tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini, UMKM menjadi salah satu penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi bahwa ada beberapa permasalahan serta kelemahan dari UMKM berdasarkan prioritasnya, meliputi kurangnya permodalan, sulit dalam memasarkan produk, ketatnya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, kurang teknisnya produksi serta keahlian, keterampilan sumber daya manusia yang kurang, serta kurangnya pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi. Sedangkan masalah mendasar yang banyak dijumpai oleh para pengusaha kecil yakni pemasaran yang mana meliputi tiga hal, mulai dari persaingan pasar dan produk, akses terhadap informasi pasar, serta masalah dari sisi kelembagaan pendukung usaha kecil. (Sopanah, Chairul Anam, 2021: 940)

Berbagai program serta kebijakan dalam pembangunan mulai diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmadi, 2019: 4). Dalam merespons kesempatan yang positif ini untuk lebih meningkatkan

perekonomian di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk menciptakan ruang-ruang serta wadah positif bagi masyarakat DKI Jakarta yang memiliki minat untuk berwirausaha, termasuk menjadi wadah baru bagi para pelaku UMKM dengan meluncurkan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) merupakan salah satu dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020. Program PKT yang memiliki nama *branding* Jakpreneur ini merupakan program lanjutan sekaligus penyempurnaan dari program unggulan Anies dan Sandi yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang telah terlaksana dari tahun 2018 (Mahmudah, Asari, 2021). Program ini menjadi salah satu program unggulan di Provinsi DKI Jakarta, karena mendukung terciptanya wirausaha baru di DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan terciptanya lapangan kerja sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari adanya Program PKT adalah menaikkan angka serta kualitas dari pendayagunaan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menciptakan keunggulan yang bersifat kompetitif dalam rangka memperkuat perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Program ini dilandaskan oleh tujuh tahapan yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan

usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Dalam melaksanakan tiap tahapan, wirausahawan program didampingi oleh para pendamping PKT (Hendro, Arlinda, 2020: 32). Melalui ketujuh tahapan ini, binaan PKT diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaannya melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat enam dinas tingkat provinsi yang bertugas untuk menjalankan program PKT. Masing-masing dinas mempunyai suatu jaringan atau ikatan yang melibatkan kegiatan PKT di dalamnya. Keenam dinas tersebut diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Program PKT dilaksanakan secara menyeluruh pada keenam dinas yang telah ditetapkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Tiap dinas yang menyelenggarakan program PKT memiliki target, cara pengelolaan program, hingga karakteristik binaan yang berbeda.

Tabel 1.2 Indikator Keberhasilan Tahapan Program PKT

Tahapan Program		Indikator Keberhasilan
P1	Pendaftaran	– Mencapai target 200.000 wirausahawan baru dalam kurun waktu 2018 – 2022
P2	Pelatihan	– Peserta mendapatkan sertifikat pelatihan – Peserta mengetahui minat usahanya
P3	Pendampingan usaha	– Peserta mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan – Peserta dapat meningkatkan skala usahanya
P4	Perizinan	– Peserta memiliki izin usaha
P5	Pemasaran	– Peserta menguasai taktik pemasaran langsung – Peserta menguasai taktik <i>digital marketing</i>
P6	Pelaporan Keuangan	– Peserta memiliki laporan keuangan yang <i>bankable</i> (memenuhi persyaratan dari bank)
P7	Permodalan	– Peserta mendapatkan fasilitas permodalan

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2022

Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Peserta PKT Tiap Tahapan tahun 2021-2022

2021							
Dinas Pengampu	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	86,742	60,296	71,499	60,070	6,970	2,954	1,788
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,591	4,864	2,419	4,212	605	116	90
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6,761	6,067	4,509	6,087	2,140	2,878	190
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	5,655	4,248	3,348	3,586	1,714	1,449	941
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,554	358	273	576	248	23	16
Dinas Sosial	2,038	1,381	1,187	929	206	265	168

2022							
Dinas Pengampu	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi	34,905	59,302	70,431	75,933	14,228	3,025	1,137

Usaha Kecil dan Menengah							
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,484	5,134	1,829	8789	221	300	44
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6,213	4,345	3,712	9,869	300	1,491	143
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2,456	2,900	1,396	4,640	1,260	237	98
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,615	3	90	1,211	11	24	4
Dinas Sosial	1,135	481	272	1,398	12	4	109

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Pada tabel 1.3, menunjukkan pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Parekraf) memiliki jumlah peserta yang menurun dalam penyelenggaraan tiap tahapan program PKT apabila dibandingkan dari kelima dinas lainnya. Pada tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan dari jumlah peserta Program PKT di Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta khususnya pada tahap pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan permodalan. Selain itu, jika dibandingkan dengan dinas pengampu lainnya, peserta yang telah memiliki laporan keuangan yang *bankable* di Dinas Parekraf masih sedikit, yakni hanya sebanyak 24 binaan pada tahun 2022, yakni hanya bertambah satu orang dari tahun sebelumnya.

Berikut untuk tabel persentase perkembangan dan penurunan dari jumlah peserta Program PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 1. 3 Persentase Perkembangan/Penurunan Jumlah Peserta Program PKT Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021-2022

Tahapan Program	2021	2022	Persentase Perkembangan Jumlah Peserta
Pendaftaran (P1)	1554	1615	3,9%
Pelatihan (P2)	358	3	-99,2%
Pendampingan (P3)	273	90	-67%
Perizinan (P4)	576	1211	110,2%
Pemasaran (P5)	248	11	-95,6%
Pelaporan Keuangan (P6)	23	24	4,3%
Permodalan (P7)	16	4	-75%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, 2022 (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa penurunan yang signifikan terlihat pada tahap pelatihan dengan penurunan 99,2%, pendampingan yakni menurun 67%, pemasaran sebanyak 95,6%, dan permodalan sebanyak 75%. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan program PKT memiliki penurunan dari segi jumlah peserta.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa masih berusaha dalam mendorong pertumbuhan peserta binaannya untuk masuk ke tahapan perizinan (P4) serta pelaporan keuangan (P6). Sebab masih banyak peserta PKT binaannya yang belum tersosialisasi dan memahami terkait pelaporan keuangan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga masih berusaha untuk mengurus perizinan tiap binaan mulai dari Perusahaan Rumah Tangga serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *One Single Submission* (OSS), atau

sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (Beritajakarta, 2022).

Pemerintah juga menyediakan sebuah sistem e-Order. e-Order merupakan sebuah sistem yang menyediakan ‘pasar *online*’ yang dapat digunakan bagi para pelaku UMKM yang telah terdaftar menjadi binaan PKT. Tujuan adanya e-Order ini adalah untuk menciptakan peluang usaha serta membantu UMKM dalam mendapatkan akses dalam mempromosikan produk barang/jasa yang mereka tawarkan. Jumlah peserta PKT binaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdaftar ke dalam e-Order hingga Januari 2022 yakni sebanyak 48 peserta. Jika dibandingkan dengan angka pendaftar program pada tahun 2022 yakni sebanyak 1615 orang, maka jumlah peserta yang telah terdaftar ke dalam sistem e-Order masih terhitung sangat sedikit.

Salah satu suku dinas yang disoroti yakni Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat. Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat merupakan satu-satunya Suku Dinas di Jakarta Barat yang tidak memiliki Kepala Satuan Pelaksana di tiap kecamatannya. Hal ini menjadikan informasi terkait Program PKT kurang maksimal tersampaikan pada masyarakat dan berdampak kepada penyelenggaraan Program PKT (Republika Online, 2022).

Berdasarkan data tersebut, tidak adanya Kepala Satuan Pelaksana di tiap kecamatan pada penyelenggaraan program PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat berpengaruh pada kurang optimalnya

penyampaian informasi kepada masyarakat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Parekraf) Jakarta Barat untuk mengevaluasi apakah program telah berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini membandingkan antara penyelenggaraan program PKT yang saat ini tengah dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program yang telah ditetapkan dalam Pergub, khususnya pada tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara umum, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih dalam terkait topik yang diambil. Secara khusus, penelitian diharapkan memberikan kontribusi seluas-luasnya bagi kebijakan penyelenggaraan program, serta juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan terkait dalam pengembangan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pihak Instansi

Hasil dari penelitian diharapkan bisa ikut serta dan berkontribusi dalam memberi kajian, bahan masukan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan program PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi proses pembelajaran dan penerapan teori-teori administrasi publik di kehidupan nyata. Serta diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan Program PKT.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang ingin mendalami topik serupa, sehingga

dapat memberikan wawasan yang lebih dalam serta menjadi tambahan sumber referensi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Tujuan dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Syaiful Bahri, 2021 (Implementasi Program Jakpreneur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)	Tujuan Penelitian: Mengetahui pelaksanaan, faktor, dan manfaat Program Jakpreneur Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif.	Program Jakpreneur telah dilaksanakan secara konsisten oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Dalam pengimplementasiannya, program yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Jakarta Barat ini mengacu kepada 4 variabel pada konsep Edward (komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi). Untuk variabel komunikasi mengacu pada Suku Dinas Sosial serta SKPD terkait untuk mengetahui sasaran program serta mensosialisasikan program ini pada masyarakat sasaran program fokus dari SKPD ini, yaitu orang-orang yang telah terdaftar KKS dan DTKS.	Persamaan: Penelitian ini meneliti program Jakpreneur. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Perbedaan: Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi program dengan fokus peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari menurut van Meter van Horn.
2.	Junaidi Hendro, Shabrina Arlinda, 2020	Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh program	Penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya hubungan	Persamaan: Penelitian ini meneliti program Pengembangan

	(Pengaruh Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) Terhadap Omset Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat)	Jakpreneur terhadap omset UMKM di masa Pandemi Covid-19 Metode Penelitian: Kuantitatif	dari Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) yang dilakukan dengan peningkatan omset UMKM. Hal ini didukung dengan Uji-t yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) dan omset penjualan UMKM.	Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur). Lokasi penelitian adalah di Jakarta Barat. Perbedaan: Pada penelitian ini berfokus omset UMKM pada Program Jakpreneur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan survei yang bersifat eksplanasi.
3.	Siti Mahmudah, Muhamad Asari, 2021 (Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jakpreneur Meningkatkan Kelas Melalui Kepuasan Pelanggan)	Tujuan Penelitian: Mengetahui kepuasan pelanggan Jakpreneur melalui promosi, kualitas produk, dan kemasan Metode Penelitian: Kuantitatif	Kualitas Produk, Kemasan dan Promosi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian. Pembinaan harus terus dilakukan dan berkelanjutan untuk para wirausaha Jakpreneur di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur karena membangun kualitas produk, kemasan dan promosi yang tepat akan dapat mewujudkan	Persamaan: Penelitian berfokus dalam menganalisis program Jakpreneur Perbedaan: Penelitian ini berfokus dalam kepuasan pelanggan para UMKM binaan Jakpreneur. Lokus penelitian terdahulu ini adalah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif. Teori yang digunakan penelitian terdahulu ini adalah teori kepuasan pelanggan.

			kepuasan pelanggan sehingga menjadi loyal terhadap produk Jakpreneur sehingga Produk akan Naik Kelas baik kualitas produk, kemasan, cita rasa, inovasi maupun pemasarannya.	
4.	Alwan Adyuhnaf, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Tujuan Penelitian: Menganalisis pelaksanaan dan faktor penghambat serta pendukung pada Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang dianalisis dengan beberapa indikator dinilai dapat menumbuhkan potensi kewirausahaan serta menciptakan wirausaha baru program dengan sangat baik serta dapat melalui seluruh tahapan yang telah ditentukan. Program ini juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing program PKT serta mampu meningkatkan skill para binaannya dalam pengolahan produk serta perizinan label halal produk. Akan tetapi,	Persamaan: Penelitian ini meneliti terkait pelaksanaan proqram Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan daya, penyajian daya, reduksi data, dan verifikasi data. Perbedaan: Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah teori pemberdayaan. Penelitian berfokus pada penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Pasar Rebo dengan

			program ini dinilai belum sepenuhnya menciptakan kawasan strategis. Hal ini dikarenakan program belum sepenuhnya dapat memfasilitasi kawasan kepada pra peserta program PKT.	penyekenggara yakni Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Timur.
5.	Siti Mariam, Findy Yuliani, 2022. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Studi Kasus Binaan Jakpreneur)	Tujuan Penelitian: Menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (studi kasus binaan Jakpreneur). Metode Penelitian: Kuantitatif	Pada penelitian ini disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari modal usaha terhadap pendapatan, yang berarti jika modal usaha para pelaku program Jakpreneur bertambah, maka peningkatannya juga berpeluang untuk bertambah. Pelatihan keterampilan juga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan, dimana jika teknologi informasi berkembang, maka pendapatannya akan ikut meningkat. Akan tetapi, sayangnya para pelaku UMKM masih minim	Persamaan: Penelitian berfokus dalam menganalisis program Jakpreneur Perbedaan: Lokus penelitian terdahulu berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fokus penelitiannya yakni meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM binaan Jakpreneur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

			mendapatkan bantuan modal sehingga disarankan dinas PPKUKM untuk mempermudah persyaratan bagi para pelaku UMKM binaan Jakpreneur yang ingin mengajukan bantuan modal.	
6.	Satria Rahmadi, 2019 (Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit Tahun 2019)	Tujuan Penelitian: Mengidentifikasi proses Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Wirausaha di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif	Implementasi program Jakpreneur melibatkan Kepala satuan pelaksana PKT pada tingkat kecamatan Duren Sawit serta SKPD pendamping PKT. Pembahasannya meliputi kualitas komunikasi dan tipe komunikasi yang digunakan, yakni komunikasi langsung (secara formal) dan non-formal. Hal ini membuktikan adanya hubungan intrapersonal antar atasan dan bawahan yang terjalin, sehingga dibuktikan adanya keluasan dalam proses implementasi PKT	Persamaan: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini mengambil lokus di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
7.	Ratna Sari Dewi, 2016 (Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Tujuan Penelitian: Menganalisis serta mengevaluasi proses pemberdayaan	Evaluasi dari pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)	Persamaan: Penelitian ini meneliti pengembangan kewirausahaan pada masyarakat menggunakan metode

	Melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang)	masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) di desa Balonggandu Metode Penelitian: Kualitatif	di Desa Balonggandu secara umum menunjukkan hasil bahwa PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu cukup berhasil dalam mengembangkan kewirausahaan serta turut berdampak dalam meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat	kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Perbedaan: Penelitian menggunakan teori evaluasi program yang ditinjau dari segi tujuan, jenis, jangka waktu, keluasan, pelaksana, serta sifat program penting. Penelitian ini berfokus kepada pendidikan kewirausahaan serta dari sisi pemberdayaan masyarakat.
8.	Mochamad Iqbal, 2018 (Implementasi Program Wirausaha Baru (WUB) di Kota Bandung Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat)	Tujuan Penelitian: Menganalisis sejauh mana Implementasi Program Wirausaha Baru (WUB) di Kota Bandung Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Metode Penelitian: Kualitatif	Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian program wirausaha baru di Kota Bandung. Diantaranya seperti terbatasnya ketersediaan SDM jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program wirausaha baru. Upaya yang dilakukan seperti adanya intensifikasi	Persamaan: Penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana hasil yang didapat dari program yang berfokus dalam pengembangan kewirausahaan. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Perbedaan: Penelitian ini berfokus untuk meneliti program pengembangan kewirausahaan yang ada di Kota Bandung yang diselenggarakan

			pelaksanaan serta pengelolaan wirausaha baru melalui peningkatan kualitas wirausaha baru yang telah ada, menambah jumlah masyarakat yang ingin menjadi bagian dari program wirausaha baru, serta mengajukan penambahan anggaran dana	oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.
9.	Handoko Dwi Susantyo; Ermaya Suradinata; Megandaru W Kawuryan, 2022 (Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan)	Tujuan Penelitian: Mengetahui proses <i>collaborative governance</i> atau tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan serta melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses <i>collaborative governance</i> pada lokasi penelitian yang dipilih. Metode Penelitian: Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pelaksana Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, dan Bank DKI, terdapat faktor-faktor penghambat yaitu indikator <i>governance, sharing of information</i> dan <i>trust among participant</i> . Berdasarkan faktor penghambat tersebut	Persamaan: Penelitian ini meneliti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Perbedaan: Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> dengan meneliti bagaimana penyelenggaraan serta proses <i>collaborative governance</i> pada program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

		deskriptif melalui pendekatan induktif	disusun strategi dengan penyusunan <i>Standart Operational Procedure</i> (SOP) dalam setiap tahapan program, adanya monitoring dan evaluasi bersama serta edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma dalam pemberdayaan ekonomi.	Satuan Pelaksanaan Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, dan Bank DKI.
10.	Rika Persianti; Nurul Indarti; Sivilokonon. Cand. Merc., Ph.D, 2020 (Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Selatan (Unit Kecamatan Jagakarsa))	Tujuan Penelitian: Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKT di Suku Dinas PPKUKM pada Unit Kecamatan Jagakarsa, dengan melihat PKT sebagai sebuah proyek yang menggunakan pendekatan <i>the iron (golden) triangle</i> yang mencakup lingkup waktu, biaya, dan kualitas. Metode Penelitian: Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penetapan waktu pelaksanaan PKT dilakukan di awal sesuai prosedur lelang kegiatan dengan mempertimbangkan kesiapan narasumber, kondisi tempat, serta pembagian teknis SDM di lapangan tanpa memperhatikan faktor lainnya. Sosialisasi terkait kewirausahaan kurang masif dalam menjangkau masyarakat. Pelatihan juga masih bersifat umum dan teoritis. Penerapan aplikasi laporan keuangan belum banyak digunakan	Persamaan: Penelitian berfokus dalam mengevaluasi pelaksanaan PKT menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer (melalui wawancara) dan sekunder. Perbedaan: Penelitian mengambil lokus pada pelaksanaan PKT di Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan pada Unit Kecamatan Jagakarsa.

			dalam praktek usaha peserta. Fasilitas akses permodalan masih kurang maksimal.	
--	--	--	--	--

1.5.2 Administrasi Publik

Dikutip dari Murpratiwi (2019: 49), menurut Nigro dan Nigro, administrasi publik merupakan suatu kegiatan dalam kerjasama kelompok pada lingkup pemerintah dengan mencakup tiga cabang pemerintah yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Dimock dan Dimock (1986), administrasi publik merupakan hal yang mempersoalkan masalah ‘apa’ dan ‘bagaimana’ dalam lingkungan pemerintahan.

Chandler & Plano (Pasolong, 2019:8) merumuskan administrasi publik menjadi suatu proses sumber daya serta personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan dalam rangka melakukan formulasi, implementasi, serta pengelolaan dari keputusan yang ada dalam kebijakan publik. Administrasi publik bertujuan menjadi pemecahan atas segala permasalahan yang hadir dalam masyarakat dengan tujuan memberikan perbaikan terutama dalam sumber daya manusia, organisasi, dan keuangan. Hal ini didukung oleh penjelasan Chandler & Plano yang mengatakan administrasi publik merupakan seni serta ilmu dengan tujuan menjalankan segala tanggungjawab yang berhubungan dengan urusan publik dan juga menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya sudah ditentukan.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mendefinisikan administrasi publik sebagai bentuk kerja sama pada lingkup pemerintahan dengan tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, serta

yudikatif, ataupun gabungan dari ketiga hal tersebut. Administrasi publik berperan penting untuk menjadi rumusan dalam kebijakan pemerintah serta menjadi bagian dari adanya proses politik. Ini berkaitan erat dengan berbagai *stakeholders*, seperti adanya pihak swasta.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus dalam mengembangkan disiplin ilmu terkait dengan masyarakat, baik dalam perseorangan seperti sumber daya manusia maupun dalam kelompok seperti organisasi. Administrasi publik erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah, sebab pemerintah adalah bagian yang paling penting serta mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala sektor.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Disiplin ilmu Administrasi Publik memiliki pergeseran paradigma-paradigma administrasi publik yakni antara lain:

Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926)

Asumsi dari dikotomi politik dan administrasi yakni memisahkan antara politik dan pemerintahan sebagai bentuk strategi dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Pemikiran ini digagas pertama kali oleh Woodrow Wilson dalam publikasi esainya dengan judul “*The Study of Administration*” yang juga dipublikasikan dalam *Political Science Quarterly* (Bhaseka dalam Fitriyani, 2021)

Administrasi publik yang efektif memiliki beberapa persyaratan, yakni diantaranya (1) pemisahan politik administrasi, (2) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap yang mirip bisnis terhadap operasi harian, serta (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, dan tidak lupa mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma inilah yang memberikan sebuah orientasi ilmiah sebagai pembeda antara fakta dengan nilai (Henry dalam Fitriyani, 2021)

Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Pada paradigma kedua, pembahasan terkait administrasi diawali dengan terciptanya buku berjudul "*Principles of Public Administration*" dari W.F. Willoughby pada tahun 1927. Paradigma ini memiliki fokus dalam melihat prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku secara umum pada semua lingkungan sosial budaya dan berlaku pada semua organisasi.

Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Paradigma ketiga menggambarkan administrasi publik sebagai ilmu politik. Henry melihat administrasi publik ingin direbut kembali dari ilmu politik oleh beberapa ilmuwan politik. Di periode yang serupa, muncul pula peningkatan usaha ilmuwan manajemen yang juga kembali ingin mengikutsertakan administrasi publik menjadi bagian dalam ilmu

manajemen. Kemudian paradigma inilah yang mengimplementasikan suatu upaya dalam membangun kembali hubungan yang bersifat konseptual administrasi pada waktu itu. Sebab itulah administrasi kemudian kembali disatukan pada induk ilmunya yakni ilmu politik, sebagai hasil dari suatu perubahan dan pembaharuan.

Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Pada paradigma keempat, Henry menjelaskan bahwa ilmu administrasi adalah induk dari ilmu administrasi publik. Pada masa ini pulalah, administrasi publik kemudian berkembang sebagai ilmu administrasi yang diawali dari ketidaksukaan administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Administrasi hanya dianggap memberikan fokus akan tetapi tidak pada lokusnya. Lalu kemudian ilmu administrasi ini lalu menjadi gabungan dari ilmu manajemen dan teori organisasi (Fitriyani, 2021)

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – 1990)

Pada paradigma ini, administrasi publik telah berkembang menjadi ilmu administrasi publik, yakni sudah pada teori organisasi, ilmu kebijakan, serta ekonomi politik. Administrasi lalu kemudian telah berdiri sebagai suatu disiplin ilmu dan bidang kajian yang memiliki

cirinya sendiri. Lalu kemudian terjadilah pergeseran orientasi birokrasi yang menjadi kepentingan publik.

Paradigma 6: *Governance* (1990 – sekarang)

Pada paradigma keenam inilah muncul adanya reformasi. Secara umum, studi *governance* memperhatikan 3 (tiga) isu penting antara lain yakni sebagai berikut:

- a. Dimensi kelembagaan, dimana sistem administrasi mengikutsertakan banyak pelaku, baik dari unsur pemerintah maupun pihak lainnya
- b. Dimensi nilai yakni menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Dari sinilah dikenal nilai apa yang harus digunakan, apakah substantif dan prosedural
- c. Dimensi proses merupakan dimensi yang menerangkan suatu respon dari berbagai lembaga terhadap adanya suatu permasalahan publik yang kompleks.

1.5.4 Kebijakan Publik

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005) juga menyebutkan bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan yang ditentukan oleh pemerintah untuk masyarakat luas, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teori ini memiliki dua makna, yakni bermakna bahwa kebijakan publik adalah keputusan dari sebuah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pemerintah, dan juga

kebijakan publik disusun oleh pemerintah, bukan lembaga swasta atau privat. Menurut James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005), kebijakan publik merupakan sebuah strategi yang ditetapkan pemerintah dan badan. Akan tetapi, adanya kebijakan publik juga muncul dari adanya faktor-faktor beserta aktor-aktor selain pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik-lah yang menjadi alat dari penetapan pemerintah yang dipengaruhi oleh lembaga di luar pemerintah serta faktor-faktor tertentu dalam proses kebijakan publik.

Chandler dan Plano menjelaskan bahwa *public policy* merupakan pemanfaatan dari sumberdaya sebagai upaya dalam mengatasi beberapa masalah publik atau pemerintah. Kebijakan menjadi bentuk campur tangan oleh pemerintah agar kepentingan kelompok yang tidak berdaya di kehidupan bermasyarakat dapat terjaga dan memunculkan partisipasinya dalam pemerintahan.

William N. Dunn berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari pilihan yang saling berhubungan, termasuk adanya keputusan untuk tidak membuat kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat oleh badan-badan serta kantor-kantor pemerintah. Sedangkan Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2012) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat. Kebijakan publik harus dapat dibedakan dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti kebijakan yang dibuat oleh swasta.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian memutuskan tindakan, baik tetap melakukan atau tidak melakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum kepada masyarakat agar tercipta hubungan sosial yang terstruktur. Secara politis, kebijakan publik adalah campur tangan pemerintah terhadap kehidupan bermasyarakat.

James Anderson sebagaimana dikutip dari Subarsono (2005), menjelaskan bahwa sistem kebijakan publik meliputi lima langkah dalam pembuatannya, yakni sebagai berikut:

1. *Problem Formulation*, menjelaskan jenis masalah yang dibahas, motif permasalahan kebijakan, serta proses agenda kebijakan dari masalah yang disepakati untuk dibahas.
2. *Formulation*, menjelaskan cara untuk meningkatkan opsi atau alternatif dalam mengatasi masalah serta pihak terkait yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan.
3. *Adoption*, menjelaskan proses penetapan alternatif serta kriteria ataupun syarat yang wajib dilakukan. Dan juga membahas terkait siapa saja aktor dalam pelaksanaan kebijakan, strategis atau proses pelaksanaan yang dilakukan, serta isi dari kebijakan yang telah ditentukan.
4. *Implementation*, menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan serta tugasnya, serta apa dampak yang ditimbulkan dari isi kebijakan.

5. *Evaluation*, menjelaskan ukuran dari dampak atau tingkat keberhasilan sebuah kebijakan, pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kebijakan, konsekuensi dari evaluasi kebijakan, serta tuntutan untuk pembatalan atau perubahan.

Relevansi dari teori kebijakan publik yang dikemukakan dengan penelitian ini, yaitu teori-teori kebijakan publik yang menjadi acuan dalam menganalisis serta mengevaluasi hasil dari tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah publik yang muncul, khususnya dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Yang mana program ini memiliki acuan dan dasar hukum dari suatu kebijakan, yakni Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020. Pergub ini secara menyeluruh mengatur pelaksanaan program PKT mulai dari tujuan dan sasaran program, penerima manfaat program, hingga indikator keberhasilan pada tiap tahapannya. Pada Pasal 33 Pergub No. 2 tahun 2020 berbunyi bahwa penyelenggaraan PKT didukung dan diatur dalam Pergub tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

Charles O. Jones dalam Baladika (2012) mengemukakan bahwa:

“...evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan berserta perkembangannya. Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemilah-pemilah objek, cara pengukuran, dan metode analisa”.

Lester dan Stewart (2000) mengungkapkan evaluasi kebijakan merupakan suatu usaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan untuk suatu kebijakan berdasarkan dari kriteria serta standar ataupun standar yang telah dibuat. Secara sederhana, evaluasi dipahami sebagai suatu penilaian pencapaian kinerja dari penerapan suatu tindakan. Evaluasi merupakan tahap paling terakhir dari proses kebijakan publik, yang mana proses ini dilakukan sebab tidak semua program kebijakan publik berjalan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itulah, proses kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. (Winarno, 2012).

Lester dan Stewart dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Pertama, yakni untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas pertama ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Apabila tidak mencapai tujuan yang diinginkan, maka faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Sedangkan yang kedua, yakni untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar ataupun kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan berkaitan erat dengan tugas pertama. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan ini menilai apakah suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam merain dampak yang

diinginkan. Dari dua tugas evaluasi kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa penting untuk melakukan tahap evaluasi dalam proses kebijakan publik, yakni untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan, menyelesaikan masalah, implementasi, maupun dampak kebijakan (Puspita, 2019). Sedangkan menurut teori evaluasi kebijakan dari Helmut Wollman (dalam Puspita, 2019), evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai alat serta prosedur dalam melakukan dua hal. Pertama, penelitian evaluasi sebagai analisis yang melibatkan program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja baik dari proses dan hasilnya. Kedua, evaluasi sebagai fase kebijakan yang secara umum mengacu kepada pelaporan informasi kembali ke proses kebijakan.

Wollman menyebutkan bahwa ada tiga model evaluasi kebijakan yang halnya dapat dijadikan acuan sebagai evaluasi kebijakan yakni *Ex-ante*, *On-going*, dan *Ex-post*. Parsons dalam Affrian (2020) juga menyebutkan bahwa evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait, yakni a) evaluasi kebijakan dan kandungan programnya serta b) evaluasi terhadap individu-individu yang bekerja dalam organisasi yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan dan program.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks (Winarno, 2012). Proses evaluasi kebijakan

melibatkan berbagai macam kepentingan dari individu maupun *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Menurut Jones dalam Winarno (2012) tahap evaluasi kebijakan meliputi beberapa kegiatan yakni pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. *Specification* merupakan kegiatan paling penting diantara kegiatan lainnya dalam evaluasi kebijakan, sebab meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui bagaimana program kegiatan dievaluasi. Kegiatan pengukuran (*measurement*) menyangkut aktivitas dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek yang dievaluasi dan analisis sebagai penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam menyusun kesimpulan serta akhirnya rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian dalam kebijakan atau program dengan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan. Adanya evaluasi kebijakan bermaksud untuk memberikan arahan atau acuan, baik bagi program selanjutnya ataupun sebagai masukan bagi kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan, seringkali ditemukan fakta bahwa pelaksanaannya di lapangan tidak hanya dapat berbuah positif, namun juga bisa juga negatif.

Dalam mengevaluasi kebijakan publik, terdapat model-model evaluasi kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi dasar serta acuan agar proses evaluasi tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan

sebelumnya. Berikut merupakan model-model dari evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli.

1. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Stufflebeam dalam Affrian (2020) mengartikan evaluasi sebagai proses yang menggambarkan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif dari keputusan. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dipandang sangat membantu dalam proses pengambilan kebijakan dalam membuat suatu keputusan (*decision making*).

Tujuan terpenting dari evaluasi adalah dalam meningkatkan, bukan untuk membuktikan. Sehingga evaluasi yang dilakukan memiliki orientasi pada jangka panjang (Sangadji 2014, hal. 85). Sehingga ia membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

a) Evaluasi konteks

Evaluasi ini berkaitan dengan penyediaan informasi dalam menetapkan tujuan, merumuskan lingkungan yang relevan, serta mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan. Dalam evaluasi konteks, tujuannya adalah merumuskan *goal and objectives* (Nurain 2018, hal. 17). Menurut Yusuf (dalam Nurain 2018, hal. 17), evaluasi konteks dimulai dengan melakukan analisis konseptual dalam mengidentifikasi serta merumuskan domain yang dinilai, kemudian diikuti dengan analisis empiris terkait aspek yang dinilai.

b) Evaluasi masukan

Input (masukan) merupakan ‘bahan mentah’ dalam transformasi. Tujuan utama dari evaluasi masukan adalah untuk menentukan bagaimana pemanfaatan *Input* dalam mencapai tujuan program. Untuk itulah perlu adanya evaluasi, agar mendapatkan *Input* berupa fasilitas serta manusia yang sesuai dan bermanfaat bagi pelaksanaan suatu program.

c) Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan “apakah program sedang dilaksanakan?” (Nurain 2018, hal. 21). Dalam evaluasi proses merujuk pada; apa kegiatan yang dilakukan dalam program; siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program; serta kapan kegiatan terselesaikan.

Evaluasi proses berupaya mengetahui pelaksanaan dari rencana dalam rangka membantu dua pihak, yakni bagi staf program dapat membantu pelaksanaan aktivitas, lalu bagi kelompok pemakai yang lebih luas dapat menilai program serta menginterpretasikan manfaatnya.

d) Evaluasi produk/hasil

Evaluasi produk atau juga yang biasa disebut evaluasi akhir yakni dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan berdasarkan standar serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi produk ini diarahkan untuk mencari jawaban (Nurain 2018, 25 -26). Sehingga, dalam evaluasi produk berupaya mengidentifikasi serta mengakses *output*

dan manfaatnya, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun evaluasi CIPP dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya (Nurain 2018, hal. 27). Tujuan dari evaluasi model CIPP antara lain:

- a) *Context evaluation to serve planning decision* berkaitan dengan tujuan program, yakni mengidentifikasi serta menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari susunan dari suatu program.
- b) *Input evaluation structuring decision* berkaitan dengan sumber daya, alternatif dalam pemanfaatannya, serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Pada evaluasi *Input*, kebijakan diidentifikasi permasalahannya, kekuatan serta peluang dalam membantu pembuat keputusan menentukan tujuan dan prioritas.
- c) *Process evaluation to serve implementing decision* berkaitan dengan proses pengimplementasian keputusan, bertujuan untuk membantu dalam pelaksanaan keputusan
- d) *Product evaluation to serve recycling decision* berkaitan dengan tindak lanjut keputusan, yang mana tujuannya untuk membantu dalam keputusan selanjutnya.

2. Model Evaluasi Kebijakan menurut Helmut Wollman (2007)

Model evaluasi kebijakan menurut Wollman (dalam Affrian 2020, hal. 6-7) terbagi menjadi tiga tipe, yakni *Ex-ante*, *On-going*, dan *Ex-post Evaluation*.

- a) *Ex-ante Evaluation*. Tipe ini merupakan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik, *Ex-ante evaluation* dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi serta memberikan penilaian awal tentang perkiraan adanya dampak maupun konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan kebijakan ini untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan maupun proses pembuatan kebijakan yang berjalan.
- b) *On-going Evaluation*. Tipe evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengukur dampak/hasil dari program yang sedang berjalan. Tujuan dari adanya *On-going evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan suatu kebijakan sesuai dengan proses implementasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya proses yang menyimpang serta meluruskan kembali proses implementasi kebijakan ke tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai.
- c) *Ex-post Evaluation*. Dikutip dari Debby, Joyce (2015), menurut Wollman, *Ex-post Evaluation* merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk memberi penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

3. Model Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn (1990)

Dunn mengemukakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha dalam menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Lejiu A., et al, 2017). Evaluasi memiliki fungsi-fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni sebagai berikut:

- a) Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai kinerja dari kebijakan, seperti tentang kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Melalui adanya evaluasi kebijakan, dapat mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan dan target yang telah ditentukan dapat tercapai.
- b) Evaluasi menyumbang klarifikasi serta kritik terhadap nilai yang mendasari adanya tujuan dan target dengan mendefinisikan nilai serta mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan cara menanyakan secara sistematis mengenai kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi perumusan masalah serta rekomendasi. Dengan adanya informasi tentang kinerja kebijakan melalui kebijakan yang dievaluasi, dapat menyumbang perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat memberikan

sumbangan terhadap definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan sebelumnya perlu diganti dengan yang baru atau bahkan dihapus.

Terdapat enam kriteria evaluasi menurut Dunn yakni; efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan; perataan dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; ketepatan program.

Tabel 1.5 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program

Sumber: Dunn dalam Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik (Affrian, 2020)

Dunn juga menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua aspek yang berhubungan erat, yakni penggunaan berbagai macam model dalam memantau hasil kebijakan publik dan program serta aplikasi serangkaian nilai dalam menentukan kegunaan hasil (Affrian 2020, hal.

9). Kemudian evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasinya, yakni ‘sebelum dilaksanakan’, ‘pada waktu dilaksanakan’ atau yang biasa disebut evaluasi proses, serta ‘sesudah dilaksanakan’ atau juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan, atau disebut juga evaluasi sumatif. Dunn juga mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yakni evaluasi semu, evaluasi formal, serta evaluasi keputusan teoritis.

Tabel 1.6 Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif dalam menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran atau manfaat terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	<ul style="list-style-type: none"> – Eksperimental sosial – Akuntansi sistem sosial – Pemeriksaan sosial – Sintesis riset dan praktik 	<ul style="list-style-type: none"> – Sajian grafik – Tampilan tabel – Angka indeks – Analisis seri waktu terinterupsi – Analisis seri terkontrol – Analisis diskontinu-regresi
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya serta valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator secara resmi merupajan ukura dari nilai atau manfaat	<ul style="list-style-type: none"> – Evaluasi perkembangan – Evaluasi eksperimental – Evaluasi proses – Retrospektif (Ex-Post) – Evaluasi hasil retrospektif 	<ul style="list-style-type: none"> – Pemetaan sasaran – Klarifikasi nilai – Kritik nilai – Pemetaan hambatan – Analisis dampak-silang – Discounting

	tujuan program kebijakan			
Evaluasi Keputusan Teoritis	Dengan metode deskriptif, menghasilkan informasi terpercaya serta valid terkait hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran berbagai pelaku baik secara formal maupun non-formal merupakan ukuran dari nilai atau manfaat	Penilaian terkait dapat atau tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas atribut (prosedur untk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan)	Brainstorming analisis argumentasi Delphi kebijakan analisis survei pemakai (prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku kebijakan lainnya mengenai evaluabilitas suatu kebijakan atau program.

Sumber: Nugroho dalam Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik (Affrian, 2020)

1.5.6 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle (dalam Akib dan Tarigan, 2008) implementasi merupakan proses yang dapat diteliti dalam tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan menjadi penghubung dari tujuan kebijakan serta realisasinya pada hasil kegiatan pemerintah. Grindle (1980:7) juga menyebutkan bahwa kegagalan ataupun keberhasilan dapat dievaluasi dari kapasitas dalam menyampaikan program. Demikian hal tersebut dapat diukur dari *outcomes* tujuan kebijakan. Keberhasilan dari suatu kebijakan juga dapat diamati melalui dua hal, yakni:

- a. Merujuk pada proses, yakni dengan melihat bagaimanakah pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dilihat dari tindakan kebijakan
- b. Melihat apakah tujuan kebijakan telah diperoleh dengan dua faktor yang dapat diamati, yakni:
 - 1) Penerimaan kelompok sasaran serta tingkat transisi yang terjadi;
 - 2) Efek yang terjadi pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok

Grindle (1980) juga menyebutkan bahwa tingkat *implementability* dari suatu kebijakan dapat diamati dengan *context* dan *content*, diantaranya:

a. *Content of policy* atau isi kebijakan

1) Tipe manfaat

Content of policy menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan dapat terdiri dari jenis-jenis manfaat yang memberikan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan.

2) Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan berkaitan dengan seberapa besar pencapaian dari transisi yang dilakukan dengan skala implementasi kebijakan yang jelas.

3) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai macam kepentingan serta sejauh mana kepentingan yang ada dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya.

4) Sumber daya yang dilibatkan

Adanya dukungan dari sumber daya yang digunakan dalam penerapan kebijakan dapat membuat kebijakan tersebut menjadi lebih baik.

5) Pelaksanaan program

Adanya dukungan dari pelaksana kebijakan yang kompeten dalam bidangnya.

6) Letak pengambilan keputusan

Pemapanan terkait dimana letak dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

b. *Context of implementation* atau lingkungan implementasi

1. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap menjelaskan tingkat kepatuhan, daya tanggap, serta respon dari para pelaksana kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan pengusaha

Karakteristik dari lembaga atau penguasa menggambarkan personalitas watak mereka yang pada akhirnya berpengaruh pada penyelenggaraan kebijakan.

3. Kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat melihat kekuatan, otoritas, strategi, serta kepentingan yang digunakan para aktor untuk melancarkan jalannya pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan oleh Grindle dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni dari sisi faktor konten (isi kebijakan) serta konteks (lingkungan kebijakan). Dalam penelitian ini, penulis melihat faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat melalui satu faktor konten (isi kebijakan) yakni sumber daya yang dilibatkan serta satu faktor konteks (lingkungan implementasi) yakni kepatuhan dan daya tanggap.

1.5.7 Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara khusus diterbitkan dalam rangka mengatur mengenai penyelenggaraan program PKT serta untuk menerbitkan perubahan konsep dan indikator keberhasilan yang sebelumnya telah ditetapkan yakni pada Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2018.

Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu diselenggarakan oleh Dinas PPKUKM sebagai koordinator penyelenggara PKT beserta perangkat daerah lain yakni Dinas KPKP, Disnakertrans, Dinas Parekraf, Dinas PPAPP, Dinas Sosial, serta *stakeholders* lain sebagaimana pada ayat (1) pasal (5). Berdasarkan pada pasal (4), sasaran program PKT ditujukan bagi wirausaha pemula. Yang mana wirausahawan pemula sebagaimana dimaksud dapat berupa wirausaha naik kelas dan pencari kerja. Sasaran wirausahawan pemula ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk diantaranya keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan penyandang disabilitas.

1.5.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pikir dari peneliti yang bertujuan menjadi dasar-dasar dalam pemikiran. Kerangka berpikir dibuat untuk memperkuat sub fokus dari latar belakang penelitian ini (Yunianto, 2018). Pada penelitian kualitatif terdapat sebuah landasan untuk dasar penelitian supaya penelitian menjadi terarah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dibuat untuk mengembangkan konteks dan konsep dari penelitian, sehingga penelitian semakin jelas konteks, metodologi, serta penggunaan teorinya. Menurut Sugiyono dalam Yunianto (2018), kerangka berpikir memiliki tujuan untuk membentuk alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Berdasarkan uraian di atas, terdapat gambaran dari beberapa konsep yang menjadi acuan penulis pada penelitian kali ini.

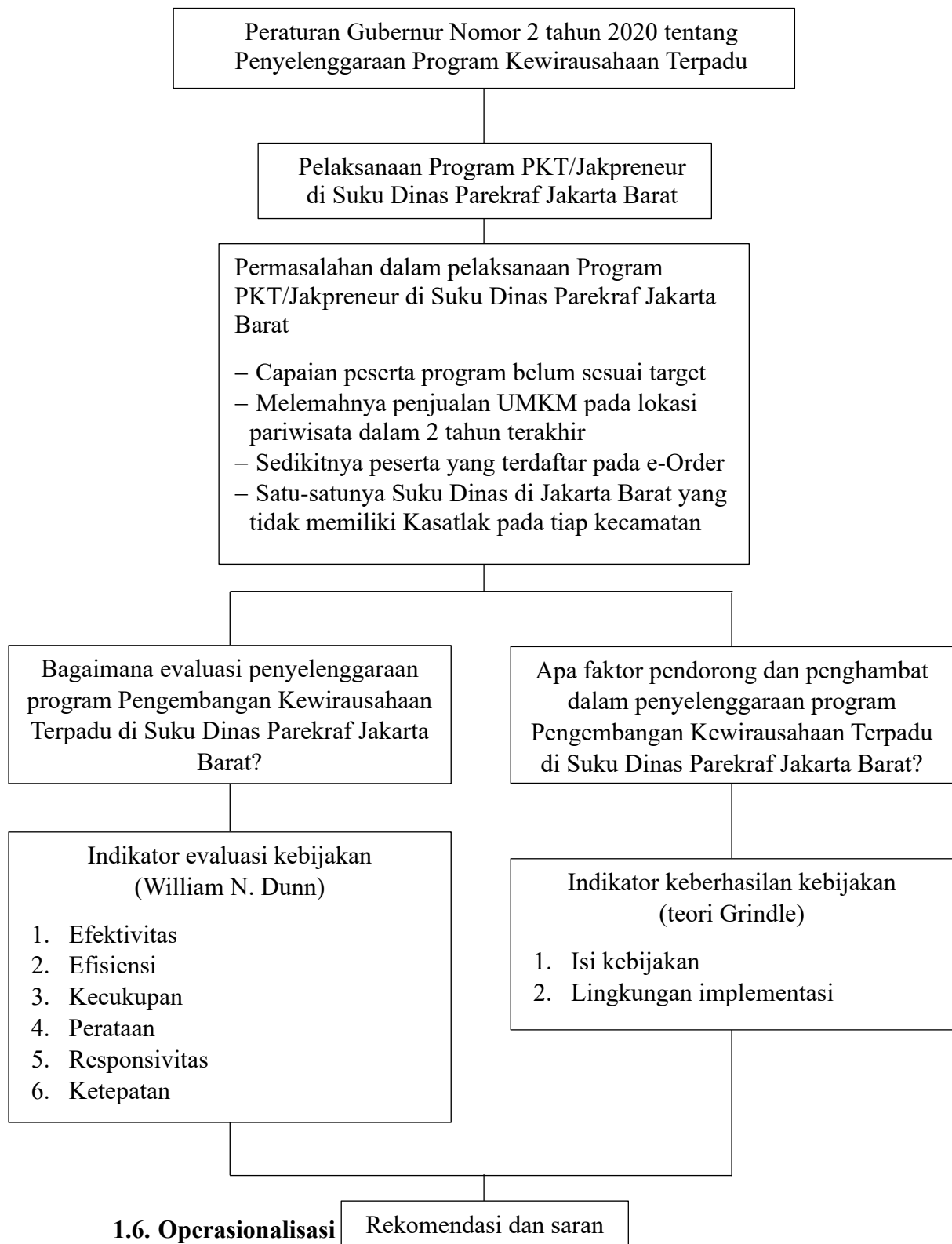
Penulis menggunakan teori dari William N. Dunn dalam mengevaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan menurut Dunn, evaluasi berkenaan dengan manfaat dari hasil kebijakan. Yang mana hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan program PKT yakni sebagai implementasi Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 untuk mendukung terciptanya wirausaha baru di DKI Jakarta.

Kriteria-kriteria dari teori evaluasi kebijakan menurut Dunn juga relevan dengan permasalahan yang terjadi, yakni a) efektivitas kebijakan; b) efisiensi pelaksanaan kebijakan c) kecukupan kebutuhan, memecahkan

masalah sesuai kebutuhan, nilai, dan kesempatan; d) pemerataan pelaksanaan kebijakan melalui indikator apakah manfaat program telah dirasakan oleh kelompok-kelompok sasaran; e) responsivitas, melihat apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu serta apakah terdapat perubahan yang signifikan; serta f) ketepatan program, dilihat dari ketepatan pilihan kebijakan diukur dengan indikator hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program dibandingkan dengan maksud dan tujuan. (Lejiu A., et al 2017, 518-519).

Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, penulis menggunakan indikator keberhasilan implementasi menurut Grindle, yang terdiri dari isi kebijakan (*context of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Teori ini dipilih sebab penulis mengukur proses pencapaian hasil akhir (*outcome*) yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Penelitian ini menggunakan indikator isi kebijakan untuk mengetahui manfaat atau dampak positif yang dihasilkan, seberapa besar perubahan yang ingin dicapai, serta sumber daya yang mendukung implementasi berjalan dengan baik. Sementara itu, berdasarkan dengan indikator lingkungan implementasi, program dilihat berdasarkan kepatuhan dan daya tanggap. Secara lebih lanjut, kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut.



Dikutip dari Priadi (2018) menurut Sugiyono, definisi operasional

merupakan penentuan konstrak ataupun sifat yang dipelajari sehingga menjadi variabel yang bisa diukur oleh peneliti. Sedangkan operasional menurut Nani (dalam Priadi 2018) merupakan rumusan mengenai ruang lingkup serta ciri dari konsep yang menjadi pokok pembahasan serta penelitian karya ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi konsep merupakan cara untuk menurunkan konsep penelitian yang disajikan melalui tabel agar penelitian mudah dipahami dan diukur. Beberapa definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat berkaitan dengan memberikan nilai terhadap kebijakan maupun program yang telah berjalan untuk beberapa waktu, melalui indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yakni; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat dengan identifikasi melalui indikator keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep

Fokus Penelitian	Fenomena	Indikasi Penelitian
Mengevaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekras Jakarta Barat	Efektivitas	1. Tercapainya tujuan dan sasaran program 2. Strategi pelaksanaan program
	Efisiensi	1. Waktu dalam mencapai tujuan program 2. Biaya pengelolaan program
	Kecukupan	1. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 2. Ketersediaan upaya pencapaian tujuan program
	Perataan	1. Luasnya jangkauan program
	Responsivitas	1. Respon masyarakat terhadap program
	Ketepatan	1. Ketepatan manfaat program 2. Ketepatan jumlah penerima atau kelompok sasaran program
Faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekras Jakarta Barat	Isi kebijakan	1. Sumber daya yang dilibatkan
	Lingkungan Implementasi	1. Kepatuhan dan daya tanggap

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program Jakpreneur merupakan *brand identity* dan implementasi dari Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020. Pada penelitian ini, penulis mengevaluasi penyelenggaraan program PKT di Suku Dinas Parekras Jakarta Barat dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, serta ketepatan. Sementara itu, untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat

dalam penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, penulis menggunakan teori keberhasilan implementasi menurut Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat memiliki target mencetak 200.000 wirausahawan per kecamatan. Akan tetapi, hingga pertengahan 2022, jumlah peserta masih tercapai sebanyak 20% dari target. Sementara itu, faktor pendorong lain dalam kurang optimalnya penyelenggaraan program yakni Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat merupakan satu-satunya Suku Dinas di Jakarta Barat yang belum memiliki Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) di tiap kecamatannya. Hal ini menjadikan penyampaian informasi kurang maksimal tersampaikan pada masyarakat.

Penyelenggaraan PKT di Dinas Parekraf itu sendiri juga masih belum optimal. Terlihat adanya penurunan angka peserta pada tahapan-tahapan penting dalam program, masih banyak peserta PKT binaan Dinas Parekraf yang belum memahami terkait penyusunan laporan keuangan, serta sedikitnya peserta binaan yang telah mendaftarkan produk/jasanya dalam e-Order.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian kali ini. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui

kenyataan mengenai apa yang telah dirasakan oleh subjek penelitian. Dengan istilah lain, penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan untuk menggambarkan penelitian menggunakan sederhana memakai eksplanasi dengan kalimat.

Penelitian kualitatif dipilih menjadi metode dalam penelitian kali ini dengan tujuan untuk memilih pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang lebih khusus pada bentuk istilah-istilah yang juga mempunyai konteks keilmiah. Sifat metode penelitian kualitatif yang sanggup menjelaskan secara rinci dengan mudah membantu penulis untuk penggalian informasi yang lebih dalam pada kaitannya dengan topik penelitian yang dipilih. Selain itu, pemilihan metode penelitian juga berkaitan dengan topik penulis yakni agar penulis dapat memahami secara lebih mendalam terkait situasi yang terjadi pada objek penelitian yakni dengan menggambarkan serta mendeskripsikan hasil evaluasi dari penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang diselenggarakan di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat.

1.8.2. Situs Penelitian

Fokus pada penelitian ini yakni mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan batas atau haris dalam penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik lekatnya variabel penelitian (Arikunto, 2011). Subjek penelitian berkaitan dengan informan atau orang yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang ada pada lokasi penelitian. Informasi yang diberikan oleh informan berguna dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dengan menyeluruh.

Penulis menggunakan cara *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini. Model *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2019).

Teknik *purposive sampling* dipilih dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang rinci dari subjek penelitian agar relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Sehingga, penelitian ini memiliki fokus untuk menggali informasi dari perangkat daerah, pendamping, serta peserta program PKT binaan Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat.

1.8.4. Jenis Data

Data penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk dan sifatnya (Siyoto, et al. 2015, 68-69), yakni:

- a. Data kualitatif, yakni data yang memakai teks ataupun kalimat tertulis yang diperoleh melalui wawancara dengan informan atau analisis dokumen seperti penelitian terdahulu, undang-undang, dan sebagainya.
- b. Data kuantitatif, yakni data yang disajikan berbentuk angka seperti persentase, jumlah, frekuensi, dan lainnya.

Penelitian ini menggunakan gabungan dari kedua data tersebut, yakni menggunakan teks atau kalimat tertulis serta persentase dan jumlah data yang relevan untuk menggali lebih dalam terkait topik yang dipilih.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data didefinisikan sebagai subjek asal dari suatu data yang diperoleh. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yakni:

- a. Data primer, yakni merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber data oleh peneliti (Siyoto, et al. 2015, 67-68). Data primer diperoleh dari proses observasi, wawancara, maupun *Focus Group Discussion* (FGD), maupun penyebaran kuesioner ataupun angket kepada informan/narasumber. Penelitian kali ini mendapatkan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data yang berkaitan dengan informasi yang telah terkumpul melalui sumber yang diolah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen lembaga

atau instansi, publikasi pemerintah, laporan, jurnal, berita, serta dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan fundamental pada proses penelitian sebab penelitian memiliki tujuan utama untuk memperoleh data yang relevan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Dikutip dari Sugiyono (2019), menurut Esterberg, wawancara merupakan sebuah pertemuan dari dua individu sehingga dapat bertukar informasi dengan lebih mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang dijawab serta diajukan terkait suatu isu.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan karena merupakan teknik yang sesuai serta tepat guna untuk mendapatkan informasi yang relevan serta mendalam terkait topik serta hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang diselenggarakan di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan pengambilan data atau informasi yang dikumpulkan melalui dokumen. Menurut Sugiyono (2019), Dokumen merupakan bentuk teknik pengambilan data yang berupa catatan sejarah dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi ini berupa artikel, laporan

kajian yang relevan, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sebagai bahan acuan.

Pada penelitian ini, dokumentasi dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data sebab penulis membutuhkan data melalui dokumentasi untuk mengambil data-data, dokumen, arsip, serta peraturan-peraturan yang memberikan informasi serta berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu khususnya pada binaan Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika sedang berlangsungnya pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai pada periode waktu tertentu. (Sugiyono, 2019). Sehingga, pada saat mewawancarai informan, peneliti telah memiliki analisis dari jawaban informan yang sedang diwawancarai.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti tetap dapat menambah pertanyaan hingga tahap tertentu apabila jawaban dari informan masih dirasa kurang memuaskan. Proses ini dilakukan hingga data serta informasi yang diberikan informan dianggap telah kredibel oleh peneliti.

Terdapat tahapan atau aktivitas yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian, salah satunya dirumuskan menjadi Analisis Data Model Miles & Huberman. Analisis data ini terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*),

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions*) (Sugiyono, 2019).

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (triangulasi) berdasarkan dari kategorisasi yang menyesuaikan dengan masalah penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum, memilah, memilih hal-hal pokok serta relevan untuk kemudian ditemukan polanya, serta juga membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat menarik kesimpulannya.

Mantja (dalam Rohman, 2011) menjelaskan bahwa reduksi data berlangsung terus menerus hingga penelitian berakhir. Reduksi data ini menghasilkan informasi yang lebih banyak serta menyajikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan topik yang diteliti.

3. Penyajian Data

Miles & Huberman (dalam Rohman, 2011) menyebutkan bahwa penyajian data dilakukan untuk mendapatkan pola-pola yang memiliki makna serta kemungkinan untuk menarik kesimpulan atau memberikan tindakan.

Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, hubungan antar kategori, *flowchart*, bagan, dan lainnya. Penyajian data

yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif adalah teks yang bentuknya naratif.

4. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, permasalahan awal hanya bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian, bahkan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila permasalahan yang telah dipaparkan di awal bersifat konsistensi memiliki bukti yang valid dari hasil pengumpulan data, maka kesimpulan dianggap kredibel (Santy 2021).

1.8.8. Kualitas Data

Sugiyono dalam Sesaria (2020) menunjukkan bahwa validitas merupakan tingkat dari keakuratan data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang sering dilakukan pada penelitian kualitatif untuk memvalidasi data. Teknik triangulasi merupakan pengecekan terhadap valid atau tidaknya data dimana membandingkan sesuatu selain data sebagai pembanding data (Moleong, 2017).

Terdapat empat jenis teknik triangulasi menurut Denzin dalam Moleong (2017), yakni triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metode (*methodological triangulation*), serta triangulasi teori (*theoretical*

triangulation). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data dengan membandingkan hasil dari wawancara mendalam kepada informan. Yang mana apabila informan yang berbeda memberikan jawaban wawancara yang serupa, maka data dapat dikatakan valid.